

ISLAM DAN TENAGA KERJA WANITA (KEADILAN EKONOMI BAGI KAUM WANITA)

Syaparuddin

Jurusan Syariah STAIN Watampone, Bone
Jl. Hos Cokroaminoto Watampone 92732 Sulawesi Selatan
E-mail: syaparuddin71@yahoo.com

Abstract: Islam and Female Workers: Economic Justice for women. This study aims at discussing about the economic justice for women. In Islam, women are allowed to work in any work fields as long as they work truly and well. Based on this statement, many women are working in many kinds of works to help the economic life of their families, including of becoming Indonesian women workers abroad. However, they commonly put the prospect of material results more priority than the risk of working abroad. As a result, they are often exploited by the irresponsible persons. Therefore, to overcome this problem, the principles, such as: work, compentation, efficiency, profesionalism, sufficiency, equal opportunity, independency, coorporation, competition, equilibrium, solidarity, and information symmetry, can be made as a guidance to uphold the economic justice for them in order to get out of the vicious circle of exploitation.

Keywords: Islam, Female workers, economic justice.

Abstrak: Islam dan Tenaga Kerja Wanita: Keadilan Ekonomi bagi Kaum Wanita. Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang keadilan ekonomi bagi perempuan. Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk bekerja dalam bidang pekerjaan selama mereka bekerja dengan baik dan benar. Berdasarkan pernyataan ini, banyak perempuan yang bekerja di berbagai jenis pekerjaan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga mereka, termasuk menjadi pekerja perempuan Indonesia di luar negeri. Namun, mereka sering menempatkan prospek hasil materi yang lebih prioritas daripada risiko bekerja di luar negeri. Akibatnya, mereka sering dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, prinsip-prinsip, seperti: pekerjaan, kompetisi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, kesempatan yang sama, independensi, kerjasama, kompetisi, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri, dapat dibuat sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi mereka untuk keluar dari lingkaran setan eksploitasi.

Kata kunci: Islam, tenaga kerja wanita, keadilan ekonomi.

Pendahuluan

Jalur usaha yang turut menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 235 juta yang separuh di antaranya adalah kaum wanita,¹ merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang dapat didayagunakan untuk membangun Indonesia.

Namun, karena tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya penghasilan serta minimnya peluang kerja di dalam negeri, maka kebanyakan kaum wanita tersebut membulatkan

tekad untuk menjadi TKW di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam hidup di zaman modern ini, uang adalah segalanya dan tanpa uang sulit untuk melakukan sesuatu. Ditambah lagi, dengan program pemerintah yang juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi jalan yang mulus bagi para TKW untuk bekerja di luar negeri.²

Pengiriman TKW ke luar negeri tersebut telah membawa devisa yang lumayan untuk Indonesia. Mereka merupakan pahlawan ekonomi bagi Indonesia. Program pengiriman ini secara langsung

¹ BPS Indonesia, *Indonesia dalam Angka 2010*, (Jakarta: BPS Indonesia, 2010), h. 34.

² Kalyanamitra, "Tenaga Kerja Wanita Indonesia: Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan", *Analisa Topikal*, Januari 2010, h. 2.

menambah perolehan devisa negara. Sebagai contoh misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2009 mengirim sejumlah 138.205 orang TKW ke luar negeri, dan mereka mengirim uang *remittance* TKI ke Indonesia melalui bank peserta program antarkerja antarnegara (AKAN), yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank Niaga serta PT. Pos Indonesia sejumlah Rp 1.497.236.878.922,00.³

Namun, di sisi lain berbagai persoalan muncul ketika TKW dikirim ke luar negeri. Misalnya, terjadi pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, dikirim oleh agen penyalur ilegal, belum ada kontrak kerja yang jelas antara pihak Indonesia dengan negara tujuan, bahkan undang-undang tentang tenaga kerja masih dalam proses pembuatan (padahal undang-undang ini penting untuk perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum). Begitu juga peran pemerintah dalam menangani masalah ini belum terlihat maksimal.⁴

Secara umum, TKW memiliki permasalahan cukup pelik. Dari faktor individu TKW sendiri seperti skill kurang memadai, termasuk pemahaman bahasa asing, dokumen yang tidak lengkap, dan faktor majikan yang sering melakukan penganiayaan terutama kepada TKW. Misalnya, pada tahun 2009 permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia berjumlah 7170 kasus, seperti: tidak mampu bekerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, majikan meninggal, pekerjaan tidak sesuai, majikan bermasalah, kecelakaan kerja, sakit, dokumen tidak lengkap.⁵

Karena faktor ekonomi yang dijadikan sebagai alasan, para TKW berani mengambil resiko yang diungkapkan di atas. Tidak jarang calon TKW tersebut pada umumnya mendahulukan prospek hasil materi yang berlimpah dan mengesampingkan resiko bekerja di negara asing yang berbeda demografis dan budayanya. Masalah ini menjadi

sangat dilematis. Di satu pihak prospek bekerja di luar negeri sangat menggiurkan, tetapi di sisi lain ada gambaran negatif yang sangat besar resikonya. Faktor pengetahuan yang kurang serta kebutuhan ekonomi dari calon TKW, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁶

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka keadilan ekonomi bagi kaum wanita menjadi penting untuk dibahas, bagaimana sebenarnya Islam menggariskan aturan tentang pekerjaan bagi kaum wanita. Mengapa pekerja wanita sering kali dijadikan sebagai obyek eksploitasi dan apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan mereka dari lingkaran setan eksploitasi. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa ruang lingkup tulisan ini dibatasi hanya pada eksploitasi terhadap TKW yang bekerja di luar negeri. Tulisan ini tidak membahas eksploitasi terhadap pekerja wanita secara umum.

Kedudukan Wanita dalam Islam

Di antara masalah yang sering dipersoalkan dalam kepustakaan maupun forum diskusi, adalah kedudukan wanita dari berbagai sudut pandang dan perspektif dalam masyarakat. Di Indonesia, kedudukan wanita berbeda-beda. Perbedaan itu setidaknya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, bentuk dan susunan masyarakat tempat wanita tersebut berada. *Kedua*, sistem nilai yang dianut masyarakat bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud di sini, adalah konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga dari masyarakat bersangkutan mengenai apa yang mereka anggap berharga dalam kehidupan mereka. Sistem nilai ini berfungsi sebagai pedoman kehidupan mereka.⁷

Sementara itu, dalam suatu masyarakat yang dibina berdasarkan ajaran Islam, maka kedudukan wanita ditentukan oleh ajaran Islam. Sesungguhnya Islam memberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada wanita dalam hukum ataupun masyarakat. Dalam kenyataan, jika kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam maka hal tersebut adalah soal

³ Lasti Kurnia, "Jemput Bola Memberdayakan Pekerja Perempuan", *Artikel*, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 5 November 2011.

⁴ Nunuk Pulandari, "Tenaga Kerja Wanita Indonesia", *Artikel*, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 10 Desember 2011.

⁵ Redaksi Kompas, "Data TKW Indonesia yang Mendapatkan Kekerasan", *Data Kompas*, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 20 Januari 2010.

⁶ Fauzi Ridzal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 78.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 29.

lain. Sebab struktur, adat, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan.⁸

Beberapa bukti yang menguatkan bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita dalam Alquran terdapat surah bernama al-Nisâ', artinya wanita. Selain Alquran, terdapat puluhan hadis Nabi Muhammad saw. yang membicarakan tentang kedudukan wanita dalam hukum dan masyarakat.⁹

Dalam catatan sejarah dapat ditelusuri bahwa ajaran Islam telah mengangkat derajat wanita sama dengan pria dalam bentuk hukum dengan memberikan hak dan kedudukan kepada wanita yang sama dengan pria sebagai ahli waris orang tua atau keluarga dekatnya. Hukum Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk memiliki sesuatu (harta) atas namanya sendiri. Padahal ketika itu kedudukan wanita sangat rendah, bahkan dalam masyarakat Arab yang bercorak patrilineal sebelum Islam datang, wanita mempunyai banyak kewajiban dan hampir tidak mempunyai hak, bahkan ia dianggap sebagai benda. Ketika masih muda, ia menjadi aset orang tuanya, sesudah menikah ia menjadi aset suaminya. Sewaktu-waktu mereka bisa diceraikan atau dimadu begitu saja.¹⁰

Fisiknya yang lemah, membuat wanita dipandang tak berguna karena ia tak dapat berperang mempertahankan kehormatan. Pandangan ini tentu saja merendahkan derajat wanita dalam masyarakat. Kedudukan wanita yang rendah itulah, kemudian menjadi salah satu hal yang diperangi dan ditinggalkan oleh Islam.¹¹

Dalam Islam menurut Qasim Amin, dijelaskan bahwa (1) kedudukan wanita sama dengan pria dalam kesempatan beriman, beramal saleh atau beribadah (shalat, zakat, berpuasa, berhaji)

dan sebagainya, (2) kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya, (3) kedudukan wanita sama dengan pria untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan, sesuai pembagian yang ditentukan, (4) kedudukan wanita sama dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan, (5) kedudukan wanita sama dengan pria dalam kesempatan untuk memutuskan ikatan perkawinan, jika syarat untuk memutuskan ikatan perkawinan itu terpenuhi atau sebab tertentu yang dibenarkan ajaran agama, misalnya melalui lembaga fasakh dan khulu' karena suaminya zhalim, tidak memberi nafkah, gila, berpenyakit yang mengakibatkan suami tak dapat memenuhi kewajibannya dan lain-lain, (6) wanita adalah pasangan pria, hubungan mereka adalah kemitraan, kebersamaan dan saling ketergantungan, (7) kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria untuk memperoleh pahala (kebaikan bagi dirinya sendiri), karena melakukan amal saleh dan beribadah di dunia. Amal saleh yang dimaksud di sini adalah segala perbuatan baik yang diperintahkan agama, bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan hidup dan diridhai oleh Allah Swt, (8) hak dan kewajiban wanita-pria, dalam hal tertentu sama dan dalam hal lain berbeda karena kodrat mereka yang sama dan berbeda pula. Kodratnya yang menimbulkan peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai suami-isteri, fungsi mereka pun berbeda. Suami (pria) menjadi penanggung jawab dan kepala keluarga, sementara isteri (wanita) menjadi penanggung jawab dan kepala rumah tangga.¹²

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa seorang wanita tidak bertanggungjawab untuk mencari nafkah keluarga, agar ia dapat sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada urusan kehidupan rumah tangga, mendidik anak dan membesarkan mereka. Walau demikian, bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, menuntut ilmu atau melakukan aktivitas lainnya. Wanita tetap memiliki peranan (hak dan kewajiban) terhadap apa yang sudah ditentukan dan menjadi

⁸ Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Tsaqâfah, 1999), h. 30.

⁹ Nawwal al-Sa'dawi, *Qadhâyâ al-Mar'ah wa al-Fikr wa al-Siyâsah*, (Kairo: Madbouli, 2001), Cet. ke-1, h. 81.

¹⁰ Iqbal Barakah, *al-Mar'ah al-Muslimah fi Shirâ' al-Tharbûs wa al-Qab'ah*, (Kairo: Maktabah Usrah, 2000), h. 205.

¹¹ Muhammad Imârah, *Qasim Amin wa Tahrîr al-Mar'ah*, (Kairo: Kitâb Al-Hilâl, 2000), h. 32.

¹² Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, h. 34-36.

kodratnya. Sebagai anak (belum dewasa), wanita berhak mendapat perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orangtuanya. Sebagai isteri, ia menjadi kepala rumah tangga, ibu, mendapat kedudukan terhormat dan mulia. Sebagai warga masyarakat dan warga negara, posisi wanita pun sangat menentukan.

Hak Bekerja bagi Wanita

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Islam membolehkan para wanita bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Hal ini ditegaskan oleh Quraish Shihab bahwa pekerjaan dan aktivitas seperti halnya tersebut di atas, sesungguhnya telah dilakukan oleh para wanita pada masa Nabi saw. Bahkan mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki.¹³ Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Di samping itu, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, dan ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.¹⁴

Dengan demikian, jika kaum wanita memiliki kemampuan (sains, skill dan pengalaman) yang cukup, maka mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan yang tinggi pula. Bahkan, zaman sekarang ini kinerja kaum wanita yang dinilai oleh sebagian orang, lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal ini yaitu pada aspek keuletan dan ketelitian para pekerja wanita dengan perasaan yang lembut

di setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah, di mana hasilnya lebih dipercaya dan memuaskan.¹⁵

Karena keuletan yang dimilikinya itu, kaum wanita menjadi lebih unggul dari pada kaum pria. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kaum wanita menjadi lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum pria di berbagai pekerjaan dan aktivitas. Misalnya dalam dunia bisnis di mana banyak kaum wanita ditemukan lebih menonjol dari pada kaum pria pada saat ini. Selain itu, karena keuletannya, jenis pekerjaan yang paling sering dipercayakan kepada kaum wanita adalah jabatan sekretaris dan bendahara pada berbagai macam kantor, instansi, perusahaan, dan lain-lain. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tentang peranan dan posisi kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Karena itu, Islam tidak membatasi kaum wanita untuk berkarier, bahkan menganjurkan kaum pria dan wanita untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan kepada mereka.

Eksplotasi terhadap TKW di Luar Negeri

Pada umumnya, tuntutan wanita untuk bekerja didasari keinginan mereka untuk membantu perekonomian keluarga, baik bekerja pada sektor formal maupun sektor informal. Misalnya pada sektor informal, mereka menjadi TKW di luar negeri. Akan tetapi, mereka seringkali nekat meninggalkan Indonesia tanpa pendidikan dan keterampilan yang cukup. Akibatnya, mereka dijadikan sebagai obyek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Meskipun TKW yang bekerja di luar negeri merupakan pahlawan ekonomi bagi negara, tetapi pada kenyataannya, mereka seringkali mengalami berbagai macam eksploitasi di sana.¹⁷ Bentuk eksploitasi yang dialami TKW tersebut, antara lain: seperti kasus eksploitasi yang dialami oleh Ceriati, Ruyati dan Darsem, pungli di KJRI/KBRI,

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1999), h. 275.

¹⁴ Ibrahim ibn Ali al-Wazir, *‘Ala Masyârif al-Qarn al-Khamis ‘Asyar*, (Kairo: Dâr al-Syuruq, 1979), h. 76.

¹⁵ Fatimah Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009), h. 76.

¹⁶ Fatimah Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, h. 78.

¹⁷ Nunuk Pulandari, “Tenaga Kerja Wanita Indonesia”, Artikel, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 10 Desember 2011.

dan pemotongan gaji TKW.

Pertama, kasus Ceriyati. Ceriyati adalah seorang TKW yang bekerja di Malaysia yang mencoba kabur dari apartemen majikannya. Bentuk eksploitasi yang dialami oleh Ceriyati dalam kasus ini adalah berupa siksaan fisik dan non fisik yang dilakukan kepadanya. Karena itu, Ceriyati berusaha turun dari lantai 15 apartemen majikannya karena tidak tahan terhadap siksaan tersebut yang dilakukan kepadanya. Dalam usahanya untuk turun, Ceriyati menggunakan tali yang dibuatnya sendiri dari rangkaian kain. Usahanya untuk turun kurang berhasil karena dia berhenti pada lantai 6 dan akhirnya harus ditolong petugas pemadam kebakaran setempat. Kisahnya yang terjebak di lantai 6 gedung bertingkat, menjadi *headline* surat kabar di Indonesia serta Malaysia. Hal ini menyadarkan pemerintah kedua negara tersebut tentang adanya pengaturan yang salah dalam pengelolaan tenaga kerja, khususnya TKW.¹⁸

Kedua, kasus Ruyati. Ruyati adalah seorang TKW asal Bekasi Jawa Barat, yang membunuh majikannya di Arab Saudi. Bentuk eksploitasi yang dialami oleh Ruyati adalah sama seperti yang dialami oleh Ceriyati di Malaysia, yaitu berupa kekejaman fisik dan non fisik yang dilakukan kepadanya. Karena itu, ia berusaha membunuh ibu majikannya yang bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun karena merasa tidak tahan dengan kekejamannya tersebut. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau jagal dan kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur. Lalu, Ruyati melaporkannya ke KJRI di Jeddah. Pada 18 Juni 2011, Ruyati tewas dihukum pancung di Arab Saudi akibat perbuatannya itu. Keluarganya tetap meminta jenazah Ruyati untuk dipulangkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Bahkan, pihak keluarga bertekad akan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dapat memulangkan jenazah. Sementara itu, suasana di rumah duka terus didatangi para pelayat dari kerabat dan warga sekitar. Mereka

prihatin dengan peristiwa yang dialami Ruyati.¹⁹

Ketiga, kasus Darsem. Darsem adalah seorang TKW asal Subang Jawa Barat, yang membunuh majikannya di Arab Saudi karena tidak tahan terhadap berbagai macam eksploitasi fisik dan non fisik yang dilakukan terhadapnya. Dia terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Hukuman ini dapat diperingan dengan membayar diyat atau tebusan senilai Rp. 4,7 miliar. Namun, Darsem belum sepenuhnya bebas dari hukuman secara maksimal meski telah membayar tebusan. Uang itu hanya untuk membebaskan Darsem dari hukum pancung. Setelah uang tebusan itu dibayarkan, pemerintah Arab Saudi akan menanyakan kepada keluarga korban dan masyarakat, apakah terganggu dengan pembunuhan yang dilakukannya. Jika keluarga dan masyarakat menyatakan terganggu dengan perbuatan Darsem, maka Darsem terancam hukuman 6 atau 10 tahun penjara.²⁰

Keempat, pungli di KJRI/KBRI. Para warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pelayanan keimigrasian di mana kebanyakan dari mereka adalah TKW yang bekerja di Malaysia, dibebani tarif pungutan liar. Modus eksploitasi yang dilakukan adalah penerbitan SK ganda. Untuk SK pungutan tinggi ditunjukan sewaktu memungut biaya, sedangkan SK pungutan rendah digunakan sewaktu menyeter uang pungutan kepada negara. Pungli ini berawal dari PPATK yang mengungkap aliran dana tidak wajar dari para pegawai negeri di Konjen RI Penang pada Oktober 2005. Pungutan serupa juga terjadi di KBRI Kuala Lumpur. Pungli ini menyeret para pejabat ke meja hijau, termasuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hadi A Wayarabi, Kepala KJRI Penang, Erick Hikmat Setiawan dan Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RI Penang, M. Khusnul Yakin Payapo.²¹

Kelima, pemotongan gaji TKW. Hampir semua

¹⁸ Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012.

¹⁹ Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012.

²⁰ Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012.

²¹ Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012.

TKW mengalami pemotongan gaji secara ilegal. Modus eksploitasi yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk pemotongan gaji yang disebut sebagai biaya penempatan dan bea jasa yang diklaim oleh PJTKI dari para TKW yang dikirimkannya. Besarnya potongan gaji bervariasi, mulai dari tiga sampai tujuh bulan, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Mereka terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKW adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.²²

Keadilan Ekonomi dalam Islam

Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan adanya ketidakadilan ekonomi yang terjadi terhadap para TKW yang bekerja di luar negeri. Ini adalah kezaliman, karena itu perlu diberantas dan keadilan harus ditegakkan. Menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul Allah Swt.²³ Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketaqwaan.²⁴ Seluruh ulama terkemuka sepanjang jaman sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid al-syar'ah*. Hal ini dikutip oleh Afzalurrahman dengan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Quthb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.²⁵

Terminologi keadilan dalam al-Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain 'adl, qisth, mîzân, hiss, qashd atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zhulm, itsm, dhalal, dan

lainnya. Setelah kata 'Allah' dan 'pengetahuan', keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.²⁶

Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan ekonomi harus merujuk kepada kaidah-kaidah yang digali dari nilai-nilai Alquran dan hadis. Munrokhim Misanam menyusun suatu kaidah yang digalinya dari nilai-nilai Alquran dan Hadis. Ia mengungkapkan bahwa kaidah-kaidah yang disusunnya itu merupakan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat difungsikan sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam mewujudkan perilaku ekonomi yang adil. Lebih lanjut, Misanam menguraikan bahwa prinsip-prinsip tersebut, terdiri dari: kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri.²⁷

1. Kerja (resource utilization)

Islam sebagaimana yang dijelaskan Misanam, memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Kerja dalam arti sempit menurut Misanam, adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumberdaya manusia. Sedangkan secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumberdaya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumberdaya, sumberdaya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.²⁸

²² Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012

²³ Lihat Q.S. Al-Hadîd (57): 25, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003), Cet. ke-10, h. 432

²⁴ Lihat Q.S. Al-Mâ'idah (5): 8.

²⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti dkk., (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 89.

²⁶ Zakiyuddin Baidawi, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an", *Disertasi Doktor*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2007, h. 72.

²⁷ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, Ed. I, h. 65-70.

²⁸ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 66.

2. Kompensasi (compensation)

Prinsip kompensasi menurut Misanam adalah merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumberdaya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan 'tebusan' untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya-- baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal--masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya)--tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.²⁹

3. Efisiensi (efficiency)

Efisiensi dalam pandangan Misanam adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumberdaya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumberdaya melibatkan 5 unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *maslahat* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*).

Efisiensi teknis kata Misanam, diukur dengan perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input) yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efisien pengelolaan sumberdaya. Perilaku penghematan merupakan suatu upaya untuk mencapai efisiensi teknis. Meskipun demikian, tercapainya efisiensi teknis tidaklah menjamin tercapainya efisiensi alokatif dengan sendirinya karena hasil kegiatan belum tentu memberikan *maslahat* tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan (*israf*), baik dalam

hal penggunaan sumberdaya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.³⁰

4. Profesionalisme (professionalism)

Profesionalisme yang diungkapkan Misanam adalah merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumberdaya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.³¹

5. Kecukupan (sufficiency)

Menurut Misanam bahwa jaminan terhadap taraf hidup yang layak - yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim--merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat--di mana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya--ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para Fuqoha mendefinisikan kecukupan sebagaimana yang dikutip Misanam adalah terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumberdaya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumberdaya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi terjamin.³²

6. Pemerataan Kesempatan (equal opportunity)

Setiap individu kata Misanam, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki

²⁹ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 66.

³⁰ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 66-67.

³¹ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 67.

³² Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 67.

kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumberdaya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.³³

7. Kebebasan

Dalam pandangan Islam menurut Misanam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumberdaya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.³⁴

8. Kerjasama (ta'âwun)

Misanam mengurai bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karenanya kerjasama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan

hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk berkerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.³⁵

9. Persaingan (Competition)

Islam dalam pandangan Misanam, mendorong manusia untuk belomba-lomba dalam hal ketaqwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *mu'amalah* atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Dalam suatu hadits sebagaimana yang dikutip Misanam, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.³⁶

10. Keseimbangan (equilibrium)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam menurut Misanam, dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak-pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*'an tarâdhim*). Hal ini-lah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.³⁷

11. Solidaritas

Misanam menjelaskan bahwa solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras

³³ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 67-68.

³⁴ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 68.

³⁵ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 68.

³⁶ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 68-69.

³⁷ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 69.

dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

Solidaritas kata Misanam, juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi berarti memberikan kelonggaran dan/atau membantu orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Toleransi ini bisa berbentuk pemberian maaf atas kekeliruan lawan, kelonggaran dalam pemenuhan janji, ataupun dalam menuntut haknya. Nabi mencontohkan untuk membayar utang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terima kasih.³⁸

12. Informasi Simetri

Kejelasan informasi dalam bermuamalah atau interaksi sosial menurut Misanam, adalah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.³⁹

Pemberdayaan Bagi TKW

Faktor utama yang memotivasi para wanita untuk menjadi TKW di luar negeri adalah faktor ekonomi. Pada umumnya mereka mendahulukan prospek hasil materi yang berlimpah dan mengesampingkan resiko bekerja di negara asing

yang berbeda demografis dan budaya. Masalah ini menjadi sangat dilematis.⁴⁰ Untuk mengatasi masalah ini, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Misanam tersebut di atas, yang terdiri dari: kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri, dapat dijadikan sebagai panduan dalam menemukan solusinya.

Misalnya, selama ini para TKW yang akan berangkat ke luar negeri, sebagian besar adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang pas-pasan. Sehingga mereka hanya bisa memasuki sektor non formal, yaitu menjadi pembantu rumah tangga. Dengan berpedoman pada prinsip profesionalisme dan kerjasama, maka sebaiknya mereka diberdayakan terlebih dahulu dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keahlian khusus. Jika mereka dibekali dengan pendidikan dan keahlian khusus kemungkinan akan menjadi lain. Upaya ini dapat membantu mereka mampu bersaing dan bekerja dalam sektor formal yang memiliki payung hukum dan perlakuan jelas dan bekerja secara profesional.

Selain itu, dengan melihat berbagai macam eksploitasi yang selalu terjadi pada para TKW, sepertinya upaya perlindungan terhadap TKW tersebut masih belum efektif. Selama ini jika terjadi kasus terhadap TKW, pemerintah hanya bisa mengawal sebatas proses hukum yang terjadi di negara lain. Hal ini bukan solusi karena di luar sana permasalahan eksploitasi kepada TKW ibarat gunung es. Karena itu, perlu dicarikan solusi untuk mencegah para wanita berbondong-bondong ke luar negeri.

Dengan berpedoman pada prinsip pemerataan kesempatan dan solidaritas, maka mereka perlu dibuatkan program pemberdayaan ekonomi agar mereka memiliki aktivitas tetap di dalam negeri dan mereka tidak lagi berbondong-bondong ke luar negeri. Program pemberdayaan ini dimaksudkan agar mereka memiliki kompeten untuk hidup mandiri, sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Dengan demikian, jika para wanita yang antusias menjadi TKW diberikan kegiatan ekonomi yang

³⁸ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 69.

³⁹ Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 69-70.

⁴⁰ Fauzi Ridzal, *Dinamika Gerakan...*, h. 78.

dapat membantu meringankan beban keluarganya dengan kemandirian, kemungkinan mereka akan lebih memilih berwirausaha dan bekerja di dalam negeri karena dekat dengan keluarga dan jauh dari segala macam bentuk eksploitasi. Sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran setan eksploitasi.

Penutup

Islam membolehkan para wanita bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Atas dasar ini, maka banyak wanita yang bekerja di berbagai bidang untuk membantu perekonomian keluarganya, termasuk di antaranya menjadi TKW di luar negeri. Namun, TKW yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, pada umumnya lebih mendahulukan prospek hasil materi yang berlimpah dari pada resiko bekerja di negara asing yang berbeda demografis dan budaya. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup. Sehingga mereka hanya bisa memasuki sektor non formal, yaitu menjadi pembantu rumah tangga. Akibatnya, mereka seringkali dijadikan sebagai obyek eksploitasi. Karena itu, untuk mengatasi masalah ini, prinsip-prinsip: kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri, dapat dijadikan sebagai panduan untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi mereka, agar mereka dapat keluar dari lingkaran setan eksploitasi.

Pustaka Acuan

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Amin, Qasim, *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Kairo: al-Majlis al-A'lâ li al-Tsaqâfah, 1999.

- Baidawi, Zakiyuddin, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an", *Disertasi Doktor*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2007.
- Barakah, Iqbal, *Al-Mar'ah al-Muslimah fi Shirâ' al-Tharbûsh wa al-Qab'ah*, Kairo: Maktabah Usrah, 2000.
- BPS Indonesia, *Indonesia dalam Angka 2010*, Jakarta: BPS Indonesia, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke 10, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Imarah, Muhammad, *Qasim Amîn wa Tahrîr al-Mar'ah*, Kairo: Kitâb Al-Hilâl, 2000.
- Kalynamitra, "Tenaga Kerja Wanita Indonesia: Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan", *Analisa Topikal*, Januari 2010.
- Kurnia, Lasti, "Jemput Bola Memberdayakan Pekerja Perempuan", *Artikel*, Dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 5 November 2011.
- Mernissi, Fatimah, *Wanita di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2009.
- Misanan, Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, Ed. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, Cet. ke-1.
- Pulandari, Nunuk, "Tenaga Kerja Wanita Indonesia", *Artikel*, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 10 Desember 2011.
- Redaksi Kompas, "Data TKW Indonesia yang Mendapatkan Kekerasan", *Data Kompas*, dikutip dari www.kompas.com, diakses tanggal 20 Januari 2010.
- Ridzal, Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Sa'dawi, Nawwal al-, *Qadhâyâ al-Mar'ah wa al-Fikr wa al-Siyâsah*, Kairo: Madbouli, 2001, Cet. ke-1.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Wazir, Ibrahim bin Ali al-, *'Alâ Masyârif al-Qarn al-Khâmîs 'Asyar*, Kairo: Dâr al-Syuruq, 1979.
- Wikipedia Indonesia, "Tenaga Kerja Indonesia", *Ensiklopedia Bebas*, dikutip dari www.wikipedia.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2012.